

ABSTRAK

WACANA POLITIK DALAM TAFSIR AL-QUR'AN ABAD PERTENGAHAN: ANALISIS SURAT AL-MAIDAH [5]: 54 DALAM TAFSIR AR-RAZI, AL-QURTUBI DAN AL-BAIDHAWI

Oleh: Muhammad Nabil Fadila Nasution (22105030081)

Penelitian ini mengkaji wacana politik dalam tafsir Al-Qur'an abad pertengahan dengan memfokuskan analisis pada Surat al-Mā'idah [5]: 54 sebagaimana ditafsirkan oleh tiga mufasir representatif, yakni Fakhruddin ar-Razi dalam *Mafātīh al-Ghaib*, al-Qurtubi dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, dan al-Baidhawi dalam *Anwār al-Tanzīl*. Ayat ini dipilih karena memuat narasi tentang kemurtadan dan kemunculan kaum pencinta Allah yang lemah lembut terhadap sesama mukmin namun tegas terhadap lawan—sebuah narasi yang secara historis kerap dipakai berbagai kelompok otoritas untuk mengklaim diri sebagai pewujudan “kaum pilihan” tersebut. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa produk tafsir tidak pernah lepas dari kepentingan ideologis, mazhab, maupun relasi kuasa yang melingkupi mufasirnya. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana konstruksi narasi penafsiran ketiga mufasir tersebut terhadap ayat 54, dan bagaimana kepentingan ideologis, mazhab, serta upaya legitimasi kekuasaan memengaruhi narasi penafsiran tersebut dalam konteks relasi kuasa abad pertengahan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif-deskriptif, menggunakan pendekatan filosofis-epistemologis yang dipadukan dengan analisis wacana kritis. Data primer berupa tiga kitab tafsir di atas dianalisis melalui kerangka epistemologi tafsir Abdul Mustaqim untuk membedah sumber pengetahuan, metode, dan kepentingan ideologis mufasir; teori *power/knowledge* Michel Foucault untuk melacak fungsi pendisiplinan dan legitimasi kekuasaan dalam teks; serta gagasan dekonstruktif Muhammad Arkoun untuk menyingkap “hal-hal yang tak terpikirkan” di balik otoritas penafsiran. Penelitian ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa penafsiran atas diksi “murtad” dan “kaum pilihan” pada ketiga kitab tafsir berpotensi membentuk pola legitimasi maupun delegitimasi politik yang berbeda, sejalan dengan konteks sosio-politik masing-masing mufasir—mulai dari konsolidasi

identitas Sunni di hadapan ancaman Mongol, fikih siyāsah jihad di tengah tekanan Reconquista Andalusia, hingga fungsi kontrol sosial-keagamaan otoritas penguasa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pemetaan akar epistemologis tafsir politik klasik serta menjadi bahan refleksi kritis terhadap pola klaim kebenaran tunggal yang masih muncul dalam wacana politik Islam kontemporer.

Kata Kunci: Tafsir Politik, Relasi Kuasa, Epistemologi Tafsir, QS. al-Mā'idah [5]: 54, Abad Pertengahan.

ABSTRACT

This research examines the political discourse embedded in medieval Qur'anic exegesis (tafsīr) through an analysis of Surah al-Mā'idah [5]: 54 as interpreted by three representative medieval scholars: Fakhruddin ar-Razi in *Mafātīh al-Ghaib*, al-Qurtubi in *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, and al-Baidhawi in *Anwār al-Tanzīl*. This verse was selected because it addresses apostasy and the emergence of a community beloved by God—gentle toward fellow believers yet firm toward adversaries—a narrative historically invoked by various ruling authorities to claim themselves as the embodiment of this “chosen community.” The study proceeds from the premise that no work of exegesis is free from the ideological interests, doctrinal affiliations, or power relations surrounding its author. Accordingly, this research addresses two questions: how each of the three exegetes constructs the interpretive narrative of verse 54, and how ideological interest, doctrinal affiliation, and the pursuit of political legitimacy shape that narrative within the power relations of the medieval period. This is a qualitative-descriptive library research employing a philosophical-epistemological approach combined with critical discourse analysis. The three tafsīr works serve as primary data, examined through Abdul Mustaqim's epistemology of tafsir to uncover the sources of knowledge, methods, and ideological interests at work; Michel Foucault's theory of power/knowledge to trace the disciplinary and legitimizing functions embedded in the text; and Muhammad Arkoun's deconstructive thought

to expose the “unthought” possibilities suppressed by interpretive orthodoxy. The research anticipates that the treatment of terms such as “apostasy” and “chosen community” across the three commentaries reflects distinct patterns of political legitimization and delegitimation, shaped by each exegete's socio-political context—from consolidating Sunni identity against the Mongol threat, to jurisprudence on jihad amid the pressures of the Andalusian Reconquista, to functioning as an instrument of religious-political control. This study thus aims to contribute to mapping the epistemological roots of classical political exegesis and to offer critical reflection on the recurring claims to singular truth in contemporary Islamic political discourse.

Keywords: Political Exegesis, Power Relations, Epistemology of Tafsir, QS. al-Mā'idah [5]: 54, Medieval Period.